

## Menyiapkan Pendidikan Matematika Menghadapi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dr. Masrukan, M.Si.

Jurusan Matematika FMIPA UNNES

Email: m4srुक4n@yahoo.com

### A. Pendahuluan

Terciptanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diawali dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 15 Desember 1997 yang menghasilkan *ASEAN Vision 2020* yaitu menciptakan Kawasan ASEAN yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang menurun. Satu tahun setelah itu, yakni tahun 1998 dunia mengalami krisis ekonomi tentunya termasuk kawasan ASEAN juga. Oleh karenanya baru pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun Oktober 2003 untuk menyepakati adanya suatu bentuk komunitas di lingkup ASEAN dengan nama *Bali Concord II 2003* meliputi: 3 pilar untuk mewujudkan Visi ASEAN: (1) *ASEAN Economic Community*, (2) *ASEAN Security Community*, dan (3) *ASEAN Socio-Cultural Community*. Enam tahun berikutnya yakni pada tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin-Chaam, Thailand, para pemimpin ASEAN mensahkan *roadmap for an ASEAN Community 2009-2015* yang memuat 3 (tiga) cetak-biru Masyarakat ASEAN meliputi: (1) Politik-Keamanan, (2) Ekonomi, dan (3) Sosial-Budaya.

Pada tahun 2015, kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda antar negara anggota ASEAN akan berpengaruh dalam menentukan manfaat MEA 2015 di antara negara-negara ASEAN. Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik (konektivitas dan infrastruktur). Peran interkoneksi mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar negeri.

Kesiapan daya saing perdagangan jasa Indonesia menunjukkan (1) kontribusi sektor jasa dalam perekonomian Indonesia saat ini mencapai sekitar 45% terhadap PDB; kontribusi sektor jasa diharapkan pada tahun 2025 mencapai 70% terhadap PDB (target MP3EI), (2) maskapai nasional cukup banyak tapi dari segi kualitas pelayanan maupun bandara pendukung masih kalah; (3) kualitas health care di Indonesia cukup baik, namun terbatas di kota besar dan harganya juga relatif mahal; belum lagi dilihat dari jumlah tenaga kerja kesehatan dan infrastruktur yang dibangun di Indonesia masih berada dibawah negara ASEAN lainnya, (4) tingkat kunjungan turis ke Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya meskipun Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar baik berupa kekayaan alam, budaya maupun peninggalan sejarah, (5) kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja di negara ASEAN lainnya, dan (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional.

ASEAN merupakan gerbang untuk menuju ekonomi global, dimana industri dan kegiatan usaha di wilayah ASEAN merupakan kunci dan pemain utama dalam rantai pasokan dan jaringan produksi, baik secara regional maupun secara global. Untuk itu, adalah penting mengembangkan *human development*, penyusunan strategi untuk pembangunan berkelanjutan, program pengentasan kemiskinan, kerjasama pendidikan, serta pemberdayaan wanita dan anak dalam kerangka memperkecil jurang pembangunan yang masih cukup besar di antara negara-negara anggota ASEAN. Melalui Komunitas ASEAN, para pengusaha domestik dapat memiliki kapabilitas untuk *Go International*.

Langkah-langkah strategi yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yang mengharuskan setiap negara ASEAN wajib merformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektor esensial dan syarat mutlak dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015. Era Globalisasi ekonomi menuntut peningkatan kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen, sumber daya

manusia serta upaya terus menerus dalam mengembangkan inovasi dan menciptakan efisiensi cost sehingga mampu berkompetisi dalam persiapan dunia tanpa batas (*borderless*).

Menurut **Joseph Stiglitz (Making Globalization Work)**, tak ada satu pun negara yang bisa menghindari diri dari globalisasi. Konsekuensinya, mau tidak mau setiap negara akan masuk dalam pusaran dinamika dunia, baik dinamika budaya, politik, keamanan, termasuk dalam pusaran ekonomi global. Dalam konteks globalisasi ekonomi, secara *de facto* kawasan Ekonomi ASEAN memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Asia mengingat Asia memiliki luas wilayah terbesar dunia, yakni 30 % dari total daratan dunia (sekitar 44 juta Km persegi) dan jumlah penduduk terbesar, yaitu 4 miliar. Pada saat MEA diberlakukan akan lebih banyak tenaga kerja yang saling berkompetisi merebut lapangan kerja di antara negara ASEAN, terutama tenaga kerja lokal di negara itu sendiri. Tentu bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja tinggi, akan mempunyai kesempatan lebih luas dalam mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya AEC. Kualitas SDM harus ditingkatkan baik secara informal, baik di dalam negeri maupun intra ASEAN untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena harus memerlukan adanya *Blue Print* sistem pendidikan secara menyeluruh dan sertifikasi berbagai profesi.

Dapat disadari, bahwa pendidikan khususnya pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan MEA dan dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk menghadapi integrasi regional. SDM Indonesia di nilai belum sepenuhnya siap menghadapi *MEA* sehingga SDM Indonesia harus di asah dan di perkuat melalui keterampilan. Dikarenakan, tenaga kerja terlatih jauh lebih utama dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik. SDM terdidik tanpa disertai dengan kompetensi yang memadai dapat dikalahkan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih.

Saat ini lembaga pendidikan tinggi didorong untuk dapat menghasilkan lulusan berkualitas Internasional yang dilengkapi dengan keterampilan profesional, keterampilan bahasa dan keterampilan antar budaya. Liberalisasi perdagangan jasa pendidikan merupakan kesempatan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menyambut mahasiswa asing terutama dari negara-negara anggota ASEAN. Namun pada dasarnya institusi pendidikan tinggi harus meningkatkan kualitas fakultas, kurikulum dan fasilitasnya untuk memenuhi standar internasional. Selain itu, pendidikan tinggi juga dituntut dapat mengembangkan keterampilan baik dengan kerja sama dengan institusi atau pihak lain maupun dengan pengembangan unit kegiatan mahasiswa, sehingga diharapkan dapat tercipta SDM yang terdidik dengan keterampilan yang terlatih. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota MEA bisa menjadi negara yang besar dan mampu menjadi *Man of The Match* atau bahkan bisa menjadi semakin terpuruk karena kalah bersaing sebagai efek dari zaman ini.

## **B. Dunia Pendidikan Indonesia Menghadapi Pemberlakuan MEA**

Bagian ini disadur dari tulisan Nurhayati (2015). Sejak tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali “pendidikan” sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain.

Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara yaitu, penguasaan inovasi (45%), penguasaan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi (20%), serta kekayaan sumberdaya alam hanya (10%), maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada tiga kemampuan tersebut untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah teknik bangunan, dan sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar mampu membekali kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan/networking. Kompetensi berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan yang ada. Ketrampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena siswa akan diajarkan bagaimana cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Sedangkan kompetensi membangun jaringan

dilakukan dengan pengembangan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama serta komunikasi.

Di samping itu peningkatan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Seperti program pembangunan infrastruktur sekolah yang merata, menyusun kurikulum yang lebih representatif agar dapat menggali potensi siswa (tidak sekedar *hardskill*, namun juga *softskill*).

Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas, distribusi serta kesejahteraan guru di Indonesia, karena guru merupakan salah satu tonggak untuk mendukung jalannya pendidikan, dan sangat berperan penting dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas. Sepantasnya pemerintah membuat peraturan untuk menuju penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan mampu menghadapi MEA 2015.

### **C. Peran dan Tantangan Pendidik**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sejalan dengan sistem pendidikan nasional, maka pendidik dan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan secara profesional merencanakan dan melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan melakukan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada perguruan tinggi agar lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh pekerjaan di berbagai sektor lapangan pekerjaan. Apalagi dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana para pelaku usaha dan tenaga kerja dari berbagai negara Asean akan bersaing dalam dunia usaha, sehingga dapat mengikuti perkembangan global.

Pendidikan merupakan kekuatan masa depan, karena merupakan alat perubahan yang sangat ampuh. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana menyesuaikan cara berpikir kita untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, cepat dan berubah dan sulit diramalkan. Perlu dirumuskan kembali cara mengelola pengetahuan. Ini berarti kita perlu memecahkan rintangan-rintangan antardisiplin ilmu dan mencari cara pikir baru yang dapat menghubungkan kembali apa yang selama ini terpisah-pisah. Kita harus merancang ulang kebijakan dan program pendidikan kita.

Tuntutan pengelolaan pendidikan tinggi supaya lebih efisien dan efektif juga disebabkan karena perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi, otonomi daerah, penyetaraan pendidikan, gejala semakin meningkatnya jumlah rakyat miskin sehingga tidak dapat membiayai pendidikannya, semuanya merupakan tekanan untuk melihat kembali pola-pola pembiayaan pendidikan. Bagaimanapun pola yang akan dirumuskan, misalnya pola yang sesuai dengan Undang-Undang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang pasti diperlukan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang baik.

Menyadari kelemahan dan kekuatan teori-teori manajemen modern yang diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan tinggi menunjukkan kepada kita perlunya suatu lembaga pendidikan tinggi yang otonom. Tanpa otonomi, lembaga pendidikan tinggi tidak dapat mengadakan inovasi karena terbatas kepada praktek-praktek *business as usual*. Berbagai

kegagalan menunjukkan bahwa teori-teori manajemen yang diterapkan di lingkungan pendidikan tinggi bahkan juga di dunia bisnis mengandung banyak kelemahan.

Penyelenggaraan pendidikan harus mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi stake holders yang pertama dan utama dari proses pendidikan tersebut. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan merupakan tanggungjawab masyarakat setempat. Tidak mengherankan apabila dewasa ini suatu gerakan *community-based education* merupakan dasar dari pembangunan suatu masyarakat demokratis. Pengembangan akuntabilitas horizontal pendidikan yang menumbuhkan inovasi pendidikan menuntut pula suatu lembaga yang mempunyai kesempatan untuk berinovasi. Lembaga yang demikian adalah lembaga yang otonom, dan oleh sebab itu *community-based education* harus disertai dengan *school-based management*.

Dalam proses globalisasi yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang semakin lama semakin *intens*, maka pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimanakah mengelola sistem pendidikan nasional agar dapat sejalan dengan dimanika global yang sedang akan terjadi. Sudah kita lihat pula bahwa proses globalisasi di dalam dunia terbuka tidak memungkinkan lagi hidupnya suatu organisasi yang mempertahankan *status quo*. Tidak ada jalan lain bahwa setiap organisasi harus berubah, harus dinamis, agar output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut semakin lama semakin tinggi kualitasnya.

Apabila organisasi tersebut, termasuk organisasi pendidikan, tetap mempertahankan *status quo*, maka hasilnya ialah manusia dan masyarakat Indonesia yang tidak dapat *survive* di dalam dunia yang kompetitif. Bagaimanakah kemungkinan suatu organisasi yang demikian dapat menghasilkan output yang mempunyai kualitas yang dapat bersaing. Dengan memahami berbagai masalah dalam pendidikan, di sinilah peranan tenaga pendidik baik Dosen maupun Guru, bahkan keluarga mahasiswa/siswa dapat mampu merubah kondisi negeri menuju pendidikan yang lebih maju tidak kalah bersaing dengan pendidik luar negeri. Hal itu bisa terwujud apabila didasari pendidik yang profesional, dibarengi dengan fasilitas lembaga pendidikan yang modern dan memadai, maka lembaga pendidikan tersebut akan mampu mencetak lulusan-lulusan yang terbaik mampu bersaing dengan lulusan Internasional, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlangsung pada bulan Desember 2015 sebentar lagi.

Globalisasi dengan sederetan akibat yang dapat terjadi memunculkan berbagai catatan penting dalam kerangka pendidikan. Pendidikan seharusnya selalu diarahkan pada pendidikan nilai. Perkembangan teknologi informasi telah memfungsikan dirinya sebagai penyedia informasi yang luas. Dengan demikian, ada banyak sumber informasi (sumber) belajar bagi para siswa, maka pendidikan di sekolah harus diselaraskan dengan berupaya sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi siswa untuk mengembangkan di luar sekolah.

Untuk mengadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tersebut sudah saatnya pemerintah Indonesia terutama memajukan di bidang pendidikan agar para lulusan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat Asean lainnya. Karena salah satu tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu bidang pendidikan. Bagaimana langkah pemerintah Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat Asean lainnya dalam sektor ekonomi khususnya, tidak lain adalah salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dimulainya Asean Economi Community pada bulan Desember 2015 akan lebih banyak tenaga kerja dan saling berkompetisi merebut lapangan kerja, terutama tenaga kerja lokal di masing-masing negara Asean, tentu tenaga kerja yang punya peluang adalah tenaga kerja yang profesional mampu bersaing dengan tenaga kerja Asing, untuk itu sangat dibutuhkan komunikasi berbahasa Inggris sebagai bahasa Internasional. Di samping itu juga pemerintah Indonesia harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, baik di dalam negeri maupun Asean, sehingga bisa mengalahkan tenaga kerja dari luar Indonesia.

Hal di atas merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Mau tidak mau setiap negara akan masuk dalam dinamika dunia yaitu bidang budaya, politik, keamanan termasuk lingkup ekonomi global, karena Asean Economi Community merupakan gerbang untuk menuju ekonomi global, dimana industri dan kegiatan usaha di wilayah Asean yang merupakan kunci dalam rantai pemasukan jaringan produksi, baik secara regional maupun global.

Banyak pendapat kalangan yang meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai pada bulan Desember 2015. Selain bidang pendidikan juga bidang pelayanan kesehatan (dokter), pengacara, akuntan, dll perlu ditingkatkan dengan keprofesionalannya, sehingga tidak kalah bersaing dengan masyarakat ASEAN lainnya. Untuk mengantisipasi tantangan bidang pendidikan tersebut, menurut Panjaitan (2015) ada 4(empat) usaha yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut.

1. Menciptakan situasi “solusi menang-menang” (*win-win solution*) bukan situasi “solusi kalah menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
2. Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus-menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.

Selain hal-hal di atas tiap lembaga pendidikan menciptakan program unggulan yang unik, menonjol dan unggul dimiliki atau dikuasai oleh lembaga tersebut. Dengan demikian lembaga ini menjadi satu-satunya atau pengembang utama dalam bidang tertentu. Masyarakat yang membutuhkan hal tersebut mau tidak mau menuju lembaga tersebut bila membutuhkan jasa atau produknya. Keunggulan yang dimaksud dapat berupa hal-hal berikut.

1. Laboratorium Matematika  
Lembaga yang memiliki Laboratorium Matematika yang canggih menghasilkan produk yang belum dapat dibuat oleh lembaga lain akan menjadi unggulan. Produk yang dibuat dapat berupa media/alat peraga untuk pembelajaran, maupun software atau pembelajaran matematika berbasis internet atau android.
2. Alat Peraga Manipulatif Pembelajaran Matematika  
Bagi usia siswa di pendidikan dasar, pembelajaran matematika untuk materi abstrak tidak bisa langsung disampaikan, melainkan menggunakan alat peraga yang terkenal dengan Alat Peraga Manipulatif Pembelajaran Matematika. Alat peraga yang dimaksud dapat diproduksi pabrik maupun dibuat oleh guru dan siswa. Hal ini akan menjadikan unggulan lembaga pendidikan juga pendidik lulusan lembaga tersebut.
3. Pembinaan Olimpiade Matematika  
Prestasi Indonesia di bidang olimpiade tingkat regional maupun internasional tergolong baik, bahkan mengalahkan negara-negara ASEAN termasuk Singapura. Hal ini menjadi modal bagi pendidik atau lulusan lembaga pendidikan untuk menawarkan program pembinaan olimpiade, bila perlu sampai ke luar negeri.
4. Pengembangan Alat Peraga Matematika sebagai Penilaian Kinerja Siswa  
Penilaian kinerja siswa kadang susah dilakukan karena tidak ada sarana yang digunakan. Dengan bantuan alat peraga matematika akan lebih mudah dilakukan penilaian kinerja baik untuk mengukur performa, mengerjakan tugas proyek, maupun menghasilkan suatu produk.

Untuk menghadapi tantangan tersebut perlu peningkatan mutu pendidik baik sebagai dosen atau guru melalui melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Sertifikasi  
Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Sertifikasi pendidik bukan hanya bermaksud agar yang

bersangkutan layak menerima tunangan profesi melainkan cerminan kualifikasi apakah seorang pendidik layak melakukan tugas yang semestinya. Program sertifikasi pendidik yang dilakukan pemerintah sangat beragam, mulai dari penilain portofolio pendidik, Pendidikan dan Latihan Profesional Guru (PLPG), dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sesuai undang-undang program PPG yang hanya boleh dilakukan saat ini dan seterusnya, walaupun sekarang ini pintu masuk program PPG tersebut hanya melalui program Sarjana Mengajar di daerah Tertinggal, Terjauh, dan Terluar (SM3T).

Sertifikasi di bidang pendidikan jangan dipandang hanya sertifikasi pendidik yang menyatakan bagi seseorang layak sebagai pendidik, di luar hal tersebut masih perlu banyak diupayakan. Misalnya sertifikasi pengembang kurikulum matematika, pembuat soal matematika, pembina olimpiade matematika, pengembang media dan alat peraga matematika, dan lain sebagainya. Pengelola untuk hal-hal seperti ini masih belum ada. Hal ini sekaligus merupakan peluang bagi organisasi profesi untuk melakukannya. Dengan kata lain kuncinya adalah pemberdayaan MGMP termasuk MGMP Matematika. Bisa kita contoh *National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)*, ini seperti MGMP Matematika Tingkat Nasional di Amerika Serikat yang telah mandiri menyusun standar-standar dan berbagai pedoman bagi guru matematika. Bahkan sering dirujuk Negara lain.

## 2. Akreditasi

Akreditasi diperuntukkan bagi pengelolaan program pendidikan agar memenuhi ketentuan-ketentuan dan standar tertentu. Sesuai undang-undang, penilain akreditasi ini diserahkan kepada lembaga independen. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN), baik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Masyarakat melalui organisasi profesi dapat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Lembaga akreditasi ini (BAN dan LAM) yang menentukan suatu lembaga pendidikan terakreditasi atau tidak. Lembaga pendidikan yang terakreditasi mendapat predikat salah satu A, B, atau C dengan berbagai implikasi yang menyertainya. Hasil atau status akreditasi ini merupakan gambaran kinerja suatu lembaga pendidikan terutama tenaga pendidiknya. Profesionalitas pendidik dipertaruhkan dalam bentuk status akreditasi ini.

Dalam era sekarang ini, bahkan akreditasi level nasional masih dapat ditingkatkan pada akreditasi tingkat internasional. Diawali akreditasi tingkat ASEAN, kemudian meningkat untuk tingkat ASIA, dan seterusnya. Lembaga penilai akreditasi tingkat internasional sangat beragam dan biasanya memiliki kekhasan dan fokus tertentu. Seperti yang sering diikuti oleh Unnes adalah *webometric* dan *green campus*.

## 3. Standarisasi

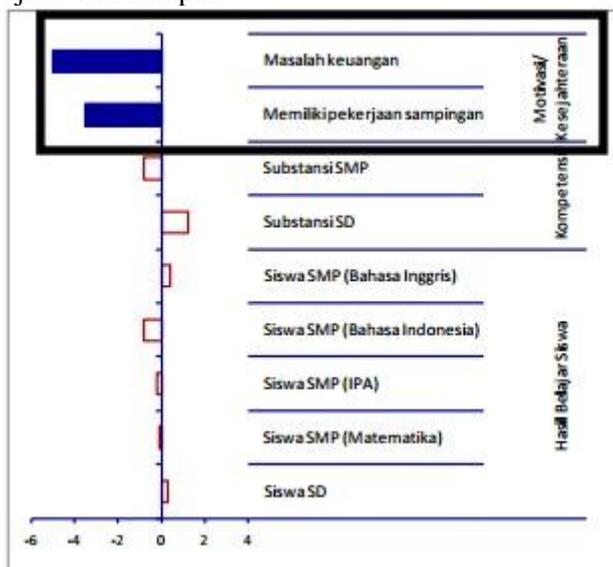
Standarisasi lembaga pendidikan lebih menekankan pada proses pendidikan maupun pembelajaran yang dilakukan. Terkait hal tersebut pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menghasilkan delapan standar pendidikan, meliputi standar-standar: isi, kompetensi lulusan, sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, proses, penilaian, pembiayaan, dan pengelolaan. Lembaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi ini berarti telah memenuhi standar nasional pendidikan, misalnya SMP A berpredikat Sekolah Standar Nasional (SSN).

Peningkatan menuju standar internasional bagi sekolah-sekolah terganjal dengan dihentikannya sekolah standar internasional. Banyak sekolah yang dirintis berstandar internasional turun menjadi standar nasional, RSBI menjadi SSN. Di sisi lain di perguruan tinggi diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum berstandar internasional, seperti kurikulum standar internasional Jurusan Matematika Unnes yang dikembangkan dengan bantuan Islamic Development Bank (IDB). Hal ini yang akan menjadi *bemper* dalam persaingan pada level internasional.

Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi standar pendidik adalah dengan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara rutin dan berkelanjutan. Hasil UKG ini sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak untuk kemudian dilanjutkan dengan aksi/kegiatan guna peningkatan kompetensi guru. Aksi yang dimaksud penting bagi kepastian pendidik maupun *stakeholders* sekolah sehingga tidak terjadi keresahan.

4. Peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik

Penghargaan bagi seorang pendidik tidak hanya gaji, namun hal ini merupakan yang utama. Tidak dipungkiri manusia ingin hidup layak dan itu semua membutuhkan pendanaan yang cukup. Kecukupan pemenuhan kebutuhan saat ini mulai bahkan sudah dilakukan pemerintah melalui tunjangan profesi yang populer dengan tunjangan sertifikasi. Dampak tunjangan ini sangat beragam, yang jelas kesejahteraan pendidik pada umumnya meningkat. Survei Bank Dunia (2012) menunjukkan bahwa hanya dua hal dampak tunjangan profesi guru, yaitu: peningkatan penghasilan dan berkurangnya pekerjaan sampingan guru. Dampak lain belum terlihat, seperti profesionalitas guru, budaya ilmiah guru, bahkan kualitas pembelajaran masih jauh dari harapan.



Gambar 1. Dampak Kausal Sertifikasi Guru

Sumber: World Bank (Dee Rea et al, 2012) dalam Wartanto (2015)

Walaupun demikian masih terlihat kesenjangan gaji guru Indonesia disbanding negara-negara ASEAN lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Bukan tidak mungkin guru-guru atau calon-calon guru yang berkualitas tinggi di Indonesia eksodus ke negara lain. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah jangan-jangan bermunculan sekolah-sekolah di Indonesia dari negara lain dengan guru-guru dari Indonesia. Ini berarti pendidik Indonesia menjadi “buruh” di negeri sendiri.

5. Rekrutmen pendidik yang profesional.

Pengadaan calon pendidik merupakan hal yang sangat penting sekaligus menjadi pusat perhatian berbagai pihak. Tidak jarang didengar pelanggaran-pelanggaran proses rekrutmen pendidik dan tenga kependidikan. Bukan hanya masalah administratif, prosedural, bahkan mengarah pada kepentingan politis. Pendidik berposisi menjadi objek yang lebih sering menderita. Pemerintah dan masyarakat seharusnya menjadikan proses ini bersih dan profesional. Tidak boleh ada penyimpangan atau penyelewengan. Era komunikasi dan keterbukaan ini dapat digunakan sebagai sarana mewujudkannya, salah satunya memanfaatkan teknologi informasi (rekrutmen *online*).

D. Penutup

Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah Indonesia sudah seharusnya lebih meningkatkan mutu pendidik dalam mengemban tugas belajar mengajar agar dapat mencetak para lulusan yang berkualitas bisa diandalkan dalam dunia lapangan kerja dan tidak kalah bersaing dengan para lulusan dari lembaga pendidikan negara Asean lainnya. Untuk menghadapi tantangan persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memajukan lembaga-lembaga pendidikan baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi, dalam pendidikan formal maupun nonformal, dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, termasuk kesejahteraan para tenaga pendidik, sehingga dapat meningkatkan spirit para tenaga pendidik maupun para anak didik. Daya saing pendidikan di

Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN dapat ditingkatkan melalui sertifikasi, akreditasi, standarisasi, peningkatan gaji dan kesejahteraan, serta rekrutmen pendidik yang profesional.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Hidayati, A. 2015. Peran dan Strategi Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi AEC 2015. Tersedia di <http://unihaz.ac.id/id/page/peran-dan-strategi-pendidikan-tinggi-dalam-menghadapi-aec-2015> diakses 15 November 2015.
- Nurhayati, D. 2015. Dunia Pendidikan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 2015. Tersedia di <https://dinanurhayati.wordpress.com/2015/06/22/dunia-pendidikan-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015/> diakses 15 November 2015.
- Panjaitan, S. 2015. Mengembangkan Sistem Pola Belajar Menghadapi MEA Tahun 2015. Tersedia di <http://www.metrosiantar.com/2015/04/16/186240/mengembangkan-sistem-pola-belajar-menghadapi-mea-tahun-2015/> diakses 15 November 2015.
- Wartanto. 2015. Strategi Mewujudkan Generasi Emas Bangsa. *Makalah*. Disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Dasar, Forum Mahasiswa Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2015.